

KONFLIK ELIT PARTAI BERBASIS AGAMA DAN REKRUITMEN CALON KEPALA DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

Nadirsah Hawari

UIN Raden Intan Lampung
nadirsahhawari@radenintan.ac.id

Abstract

Kajian ini mencoba memetakan dinamika internal pada beberapa partai politik berbasis agama dalam menghadapi kontestasi pilgub Lampung tahun 2018. Tema ini dirasa penting karena soliditas partai politik sangat ditentukan oleh kemampuan partai dalam mengelola dinamika atau konflik yang ada. Faktanya, terkadang parpol Islam sulit terbebas dari intrik, konflik kepentingan yang bermuara pada sikap pragmatis dalam menentukan keputusan politik terutama ketika bersinggungan dengan poros kekuasaan. Walhasil, baik PAN, PPP, PKB, dan PKS terindikasi terjebak dalam praktek pragmatisme politik dalam menentukan dukungan bakal calon walaupun keempat partai politik tersebut tidak sama dalam menyikapi dan menyelesaikan setiap perbedaan yang terjadi di dalam tubuh partainya

Keywords: Konflik, Elit, Partai Islam, Pilkada

Abstrak

This study attempts to map the internal dynamics of several faith-based political parties in facing the Lampung governor election contest in 2018. This theme is considered important because the solidity of political parties is largely determined by the party's ability to manage existing dynamics or conflicts. In fact, sometimes Islamic parties find it difficult to be free from intrigue, conflicts of interest which lead to a pragmatic attitude in determining political decisions, especially when intersected with the axis of power. As a result, both of PAN, PPP, PKB, and PKS are indicated to be trapped in the practice of political pragmatism in determining the support of candidates even though the four political parties are not the same in addressing and resolving any differences that occur within the party's body. Building political awareness by adopting education, recruitment and religious political awareness is precisely a recipe for the creation of strong political immunity for a political party so that the Islamic political philosophy of maintaining religious norms and managing world affairs can be realized

Keywords: Conflict, Elite, Islamic Political Parties, Governor Election

Pendahuluan

Diskursus mengenai pilkada pada era reformasi bukanlah satu tema baru (new topic) bahkan menjadi inti dari kata reformasi itu sendiri, mengingat kalimat reformasi itu membawa makna perubahan ke arah yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam bidang politik. Pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan segala turunan dan jenjangnya baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terus menjadi sorotan dan diskusi publik seiring dengan menguatnya keinginan rakyat untuk menunaikan hak politiknya secara langsung, terlebih lagi setelah puluhan tahun tidak pernah merasakan hal tersebut. *The biggest goals* dari tuntutan tersebut adalah munculnya sosok pemimpin baru yang dinilai cakap, mampu dan berintegritas dalam mengemban amanah otonomi daerah menuju daerah yang lebih baik dan sejahtera sesuai amanat proklamasi bangsa tahun 1945.

Berbagai perubahan bentuk dan perundangan telah dibuat oleh masing-masing lembaga negara dan organisasi politik yang ada untuk memuluskan proses politik dari tidak langsung menjadi langsung, undang-undang partai dan pemilu terus direvisi, termasuk undang-undang pemilihan kepala daerah yang pada ujungnya mencari formulasi tepat dan efektif demi terlahirnya sosok pemimpin yang sesuai dengan arah reformasi. Sejak pertama kali sistem pilkada langsung diterapkan di Indonesia tepatnya di Kota Depok dan Jakarta tahun 2005 hingga saat ini, banyak catatan dan rekomendasi serta telaah mendalam tentang sistem efektif yang masih terus dicari dan coba diterapkan walaupun hasilnya masih gamang dan pasang surut.

Dalam sistem demokrasi Indonesia, partai politik berperan sebagai mediator dan artikulator kepentingan rakyat versus kepentingan penguasa dan negara sehingga fungsi utama dari parpol adalah menyerap aspirasi rakyat, memberikan pendidikan dan pendewasaan politik, melakukan proses rekrutmen

politik, dan ikut serta dalam pemilu, menghantarkan anggotanya untuk mengisi jabatan-jabatan politik sesuai mekanisme yang ada. Melalui para duta partai di semua level pemerintahan, terutama eksekutif dan legislatif diharapkan akan tercipta proses *checking and balancing* dalam koridor *trias politika* sehingga kehidupan berdemokrasi bisa lebih baik dan berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan falsafah demokrasi itu sendiri (Dendy Lukmajati, 2016: 4).

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 2016 sebagai perubahan atas UU No.1 tahun 2015 Tentang Pilkada Pasal 42 ayat 1 disebutkan bahwa “Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota didaftarkan ke KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik”. Dari sini dipahami betapa besar peran parpol untuk meloloskan kandidat dalam kontestasi pilkada, selain juga berpeluang menjadi agen dan negosiator politik pada tingkat elit. Ini bukan sesuatu yang baru dalam riwayat pilkada mengingat begitu banyak pemberitaan media tentang besarnya mahar politik dan biaya politik yang harus ditanggung seorang calon ketika maju dalam bursa pencalonan.

Carut marutnya kehidupan berpolitik bangsa Indonesia saat ini disinyalir sebagai dampak kekacauan dalam sistem rekrutmen dan pola interaksi internal partai politik itu sendiri. Sikap pragmatis, in-konsistensi dalam memperjuangkan visi misi partai juga menjelmai perjuangan mereka di luar rumah partai terutama ketika berhadapan dengan kepentingan politik. Argumentasi yang disampaikan Firman Noor bahwa masalah utama partai politik adalah lemahnya kelembagaan partai politik sangatlah tepat. Dan titik lemah itu disebabkan oleh empat persoalan utama yaitu; sistem kelembagaan yang kurang ditaati, nilai normatif yang kurang dijunjung tinggi, otonomi partai yang kurang dihormati dan citra publik yang tidak memadai (Noor, 2018: 181).

Kelemahan kelembagaan yang dinyatakan Firman memaksa sebuah partai politik harus menjalin komunikasi dengan

banyak kalangan, terutama kelompok-kelompok yang memiliki kapasitas popularitas dan *financial cost* yang cukup agar kelelahan identitas parpol bisa ditutupi oleh banyaknya pendukung yang ada di sekitar rumah partai tersebut. Lalu, terbentuklah komunikasi, kerjasama, negosiasi dan kesepakatan yang sarat kepentingan baik dari elit maupun tokoh yang direkrut. Kondisi ini menurut Aritonang tidak mungkin dihindari apalagi banyak partai yang selalu ingin berada dalam ring kekuasaan (Aritonang,2016: 366) walaupun menurut Firman hal ini dianggap sebagai koalisi nir-ideologi dan nirlaba.

Berbeda dengan Wahyudi, ia menyoroti akar persoalan kekacauan itu sendiri dimana menurutnya sistem yang demokratis, terdesentralisasi sekarang ini justru menjamin dan memberi kebebasan partai politik untuk melakukan kegiatan di daerah dan sangat menentukan dalam pencalonan kepala daerah. Masalahnya, dalam sistem yang sekarang berlaku terdapat tendensi kuat pejabat lebih memperhatikan kepentingan partai daripada kepentingan publik. Menurutnya, keterkaitan antara parpol dengan pilkada dan pemerintahan lokal (*local governance*) dalam sistem demokrasi ini perlu dicermati karena menentukan masa depan proses perumusan kebijakan publik di Indonesia (Kumorotomo,2009: 1).

Fenomena politik pragmatis dalam kontestasi pilkada baik pada pilgub maupun pilbud dan pilwakot sempat menjadi sorotan para politisi di Senayan dengan munculnya wacana dan langkah hukum merevisi kembali undang-undang pemilu dengan mengembalikan mandat pada DPRD sebagai representasi dari demokrasi arus bawah dan sekaligus sebagai upaya penghematan anggaran negara dan memperkecil dampak sosial dari sebuah pesta demokrasi pada level daerah yang kerap menimbulkan kisruh dan perpecahan baik antara pendukung termasuk di internal parpol pengusung. Pilkada langsung memang rawan politik uang, rawan konflik sosial, dan cenderung memboroskan anggaran negara. Meski demikian, jawaban atas berbagai persoalan itu tampaknya bukanlah mengembalikan pil-

kada kembali kepada DPRD. Dari segi praktis, publik juga memandang pemilu melalui DPRD bukan merupakan solusi jitu membersihkan pilkada dari politik uang. Oligarki politik justru dapat lahir dari sistem barter uang dengan kekuasaan. Artinya, publik menganggap sistem pilkada mana pun tetap membuka peluang terjadinya politik uang.

Menurut Helmi Mahadi, ada dua penyebab terjadinya pragmatisme dalam politik yang ditandai dengan maraknya praktek *money politik*. Pertama, serangan arus globalisasi yang membuat orang lebih suka berfikir secara praktis dan terukur, jangka pendek dan terlihat daripada gagasan idealisme yang tidak kunjung menjadi kenyataan. Dan yang kedua gagal atau lambatnya partai politik melakukan proses kaderisasi dan promosi kader terbaiknya sehingga partai politik dihadapkan pada kondisi sulit antara mencalonkan anggota dan kader yang tidak populer atau mengambil tokoh luar berlatar belakang tajir dan dikenal publik guna menutupi biaya politik (Mahadi,2011: 104).

Menurut hemat peneliti, memang sulit untuk bisa keluar dari jebakan demokrasi lokal yang seperti ini karena akar masalahnya bukan hanya pada sistem yang masih memberi ruang, supremasi hukum internal parpol yang tidak transparan dan juga manusia itu sendiri sebagai penggerak sebuah sistem. Pemilihan (intikhab) langsung membutuhkan biaya politik yang tidak murah bahkan bisa dibilang sangat mahal dan biaya ini akan terus meningkat seiring sengitnya kompetisi terutama pada daerah yang ber-DPT sedikit sehingga muncul istilah Nomor Piro Wani Piro (NPWP).

Walhasil, para kepala daerah yang terpilih secara langsung melalui jalur partai politik semakin menguatkan posisi dan daya tawar parpol terhadap calon dan penguasa yang menang di kemudian hari. Dampaknya, menurut Mendagri setidaknya ada 392 kepala daerah yang terjerat kasus hukum sejak tahun 2004-2017 dan dari angka itu yang terkena kasus korupsi sebanyak 313 (Zulfikar,2017: 12). Dan untuk tahun 2018 sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sejak

Januari hingga pertengahan Juli sudah 19 Kepala Daerah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi. (R. N. Hakim, 2018: 17)

Banyaknya politisi tersandung kasus korupsi oleh KPK disinyalir oleh pengamat sebagai dampak dari maraknya kartelisme dalam tubuh parpol terutama kalangan elit yang menjabat di struktur tinggi parpol maupun tokoh partai yang menjabat di Eksekutif dan Legislatif sebagai balas budi dan persiapan *cost politic saving* terutama di tahun-tahun politik. Pendapat ini semakin menguat setelah terjadi kasus operasi KPK terhadap Gus Romi (mantan Ketua Umum PPP). Teguh Imansyah lebih dalam lagi menyimpulkan bahwa kerapnya parpol terlibat perilaku tidak baik berawal dari kegagalan partai itu sendiri dalam membangun iklim demokrasi di tubuh partai dan minimnya proses rekrutmen kader serta pendidikan politik yang berujung pada tidak adanya calon yang laik dari internal sehingga memberi ruang bagi tokoh eksternal terutama para pengusaha dan jutawan untuk menakhodai partai tertentu (Imansyah, 2012: 377). Hal ini dikuatkan oleh Iza, dimana kekisruhan komunikasi antara elit DPP dan DPD tidak lain karena persoalan kue yang tidak merata (Iza Rumestan, 2014: 354).

Kajian ini mencoba menyoroti satu persoalan utama yaitu tentang indikasi terjadinya konflik internal di tingkat elit partai berbasis agama (parpol Islam) yang ditandai dengan mundurnya atau diberhentikannya beberapa kader partai dari jabatan politik dampak dari konflik tersebut. Kajian ini menggunakan sumber data utama berupa dokumen baik yang bersumber dari pengurus partai, laman web, ulasan media baik elektronik maupun cetak dan sumber-sumber lain yang terkait dengan tema dengan pendekatan analisis contents.

Setidaknya ada beberapa kajian yang pernah dilakukan, diantaranya Syamsudin Haris, Lili Romli DKK dengan judul “Faksi Dan Konflik Internal Partai-Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi” yang diterbitkan JPP LIPI. Senada juga dengan

penelitian Chudry dengan judul “Konflik Internal Partai Sebagai Salah Satu Penyebab Kompleksitas Sistem Multipartai Di Indonesia” yang diterbitkan oleh Jurnal Legislasi. Nurhasim juga menulis tentang “Kegagalan Modernisasi Partai Politik Di Era Reformasi” yang diterbitkan oleh JPP LIPI. “Modernisasi Partai Politik Di Tingkat Lokal (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Dan Kabupaten Purworejo) yang ditulis oleh Iwan Hardi dan diterbitkan oleh Politika, dan yang terakhir kajian tentang “Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik” oleh Imam Yudhi Prasetya dan diterbitkan di Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan. Dari sekian banyak kajian yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya nampaknya kajian hanya sebatas persoalan konflik internal, asbab dan solusi bagi semua parpol yang ada di panggung demokrasi bangsa, sedangkan kajian peneliti dalam tulisan ini fokus terhadap persoalan konflik internal parpol Islam secara khusus dengan pendekatan historis dan argumentasi yuridis, etis dan logis.

Pilgub Lampung Tahun 2018

Pemilihan calon gubernur Lampung yang diselenggarakan KPU pada tanggal 27 Juni 2018 lalu diikuti oleh empat pasangan calon, masing-masing diusung dan didukung oleh satu atau gabungan beberapa partai politik. Keempat pasangan calon itu adalah Muhammad Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri (Petahana) diusung oleh Partai Demokrat, PPP, dan Gerindra, Herman HN-Sutono yang diusung oleh PDIP, Arinal Djunaidi-Husnunia Chalim diusung oleh PKB, Golkar, PAN dan yang terakhir adalah Mustafa-Ahmad Jajuli diusung Nasdem, PKS dan Hanura (Nadirsah,2019: 45). Semua tim sukses dan partai pendukung bekerja secara maksimal memasarkan calon yang diusung dengan berbagai macam bentuk pendekatan sesuai tahapan pilgub yang ada sampai hari terakhir masa kampanye. Dan setelah proses penghitungan berakhir, KPU selaku penyelenggara akhirnya menetapkan Paslon No.3 Arinal Djunaidi-

Chusnunia Chalim sebagai pemenang mengungguli calon lainnya.

Table 1
Rekapitulasi suara Pilgub Lampung 2018

No.	Suara Sah (%)	Partai Pengusung
1.	Ridho-Bachtiar 1.043.666 (25,46%)	PD, PPP, Gerindra
2.	Herman- Sutono 1.054.646 (25,73%)	PDIP
3.	Arinal-Nunik. 1.548.506 (37,07%)	Golkar, PKB, PAN
4.	Mustafa- Jajuli 452.454 (11,04%)	Nasdem, PKS, Hanura

Ada tiga fenomena menarik terjadi pada pilgub tahun 2018 dan sebagai pembebeda dengan pilkada sebelumnya. Pertama adanya yang calon diusung partai tunggal yaitu Herman HN-Sutono (PDIP). Kedua, adanya isu *money politic* terstruktur, sistemik dan massif yang didalangi oleh sebuah perusahaan yang dulu juga diisukan memenangkan calon jadi dan yang ketiga munculnya konflik antar elit internal parpol pendukung karena perbedaan pilihan politik.

Walaupun proses pemilihan calon Gubernur Lampung tahun 2018 sudah selesai dan tinggal menunggu tanggal pelantikan Arinal-Nunik sebagai gubernur dan wakil gubernur mengganti petahana M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri, namun lain halnya dengan partai pengusung paslon. Nampaknya kisah pilgub serentak tahun 2018 masih menyisakan catatan ringan, dinamika dan cerita yang berdampak pada soliditas dan komposisi caleg pada pileg tahun 2019. Idealnya, perbedaan dan perselisihan elit pada pilgub yang lalu dianggap selesai dan masing-masing kembali ke baraknya semula mengingat pekerjaan besar sudah menanti partai politik untuk menyukseskan agenda demokrasi tahun 2019 yang jauh lebih rumit dan memerlukan energi besar.

Isu disharmonisasi antar elit parpol sudah terbaca ketika proses tahapan pilgub Lampung baru dimulai, terutama ketika bakal calon sudah menampakkan niat dan manuver politiknya baik di internal partai maupun di media massa. Beberapa na-

ma yang muncul saat itu dan sudah menjalin komunikasi dengan elit parpol di tingkat wilayah seperti sang petahana Muhammad Ridho Ficardo, Walikota Bandar Lampung Herman HN, Bupati Lampung Tengah Mustafa, Ketua Umum Golkar Lampung Arinal Djunaidi, Bupati Lampung Selatan Zainuddin Hasan dan beberapa nama lainnya. Lazimnya sebuah proses rekrutmen dan penjaringan maka spririt berkompetispun tidak bisa dihindari apalagi ruas jalan politik juga tidak banyak sehingga tidak jarang terjadi gesekan antara satu pengendara dengan pengendara yang lain, adu kuat, adu taktik dan sesekali menyalib di garis terlarang tetapi terpaksa dilakukan karena terkadang kesalahan pemain tidak terlihat oleh wasit dan walaupun dianggap melanggar sanksi yang didapat juga ringan.

Sulitnya menyelesaikan persoalan kirsuh internal disebabkan karena perbedaan pilihan politik dikalangan elit partai nampaknya akan terus terjadi dalam sejarah pemilu baik di tingkat lokal maupun nasional karena memang sistem memiliki celah untuk itu. Besarnya biaya politik dan ketidakmampuan partai untuk menghimpun dana dari hasil usaha mandiri juga menjadi pemicu terjadinya kekusutan demokrasi ini ditambah kegagalan partai memasarkan kader terbaiknya dalam setiap momen penjaringan calon kepala daerah. Buruknya lagi demokrasi saat ini terpasung oleh stigma demokrasi kapitalis nir ideologi dan nir-norma sosialis.

Kajian ini merupakan upaya untuk melihat sejauhmana dampak kisruh internal partai politik berbasis agama yang ada di Provinsi Lampung dalam menyikapi proses pemilihan kepala daerah yang berlangsung pada tahun 2018 silam. Kajian ini menjadi sangatlah penting mengingat reformasi birokrasi dan pemerintahan daerah juga ditentukan oleh baiknya internal partai politik yang ada di daerah terutama partai pengusung calon selain bahwa pilkada serentak tahun lalu menjadi *warming up* bagi para elit untuk menggerakkan sayap partai sekaligus uji kekuatan dan adu strategi marketing politik

mereka di alam demokrasi pada level daerah sebelum pileg dan pilpres 2019.

Isu Konflik Internal Parpol Berbasis Agama di Lampung

Awalnya publik tidak yakin dan percaya bahwa proses rekrutmen bakal calon pejabat eksekutif daerah akan berdampak pada sebuah partai politik mengingat mereka adalah satu keluarga, satu nasab dalam rumah politiknya. Kemungkinan itu semakin jauh dan sulit diterima akal sehat takkala pelakunya adalah partai yang selama ini mendakwa diri sebagai partai agama, partai pengusung nilai-nilai kedamaian dan persaudaraan. Faktanya, sekali lagi publik harus mendapat penyadaran dan pelajaran baru bahwa politik itu kejam dan terkadang kotor apalagi ketika yang menungganginya juga berhati kotor dan penuh hasrat. Berita tentang adanya konflik elit internal parpol berbasis agama (parpol Islam) di Lampung lambat laun terlihat dan terbaca oleh publik dan kemudian menjadi kenyataan yang tidak bisa terbantahkan.

Pepatah Arab mengatakan bahwa setiap kepala ada pendapatnya masing-masing dan setiap pendapat ada pengikutnya begitu juga dalam hal elit politik di Lampung saat itu. Perbedaan pilihan politik yang menjurus kepada konflik sejatinya memang ada *hujahnya* masing-masing. Bagi elit lokal, mereka adalah *shahibul hajat*, tuan rumah, orang yang sangat faham dengan fakta dan dinamika politik lokal saat itu sehingga wajar jika pendapat mereka yang mestinya didengar dan diikuti oleh elit pusat. Sama halnya dengan elit pusat, sesuai mekanisme partai dan regulasi yang ada merekalah pemegang palu keputusan dan mekanisme syuro diklaim sudah dilaksanakan dan tidak ada yang in-prosedural apalagi dianggap merendahan struktur daerah. Walhasil, kedua kubu akhirnya saling berhadapan dan konflikpun tidak bisa dihindarkan lagi. Jika soliditas internal tidak kuat dan manajemen konflik tidak apik maka sudah bisa dipastikan kemana arah perahu akan berlayar, dan bagaimana nasib para abk yang ada di dalamnya. Menurut Wawan sebab utama dari masalah ini adalah ketidakber-

dayaan struktur DPD berhadapan dengan elit DPP yang dianggap sebagai anomali, ketika pemerintahan mencoba menerapkan sistem desentralisasi tapi justru parpol menerapkan sikap sentralisasi terutama terkait kebijakan pilkada (Gunawan, 2018: 114). Perbedaan kerap terjadi karena masing-masing pihak berijtihad untuk menentukan paslon yang bisa diajak kerjasama dan mampu memberi barokah electoral pada pemilu legislative 2019. Kerjasama yang dimaksud diartikan bahwa calon dapat memahami kebutuhan elit partai terutama pembiayaan pemilu sekaligus kemampuan calon untuk member dampak electoral apalagi sejak diberlakukannya PT 4%.

Berikut ini beberapa kutipan *headline* berita *online* yang sempat beredar di media Lampung yang menggambarkan tentang adanya isu konflik, tarik menarik kekuatan politik di internal sebuah parpol Islam di Lampung pada tahun 2018 yang lalu. Memang betul setiap berita belum tentu mengandung sebuah kebenaran. Tetapi berita itu adalah ungkapan dari sebuah pengamatan, perasaan dan riwayat kehidupan yang kemudian akan dibuktikan oleh fakta empiris saat waktunya tiba.

Media Kumparan.com merilis berita pada tanggal 20 desember 2017 dengan judul: "Pilgub Lampung 2018, PAN tarik dukungan untuk Arinal. Dalam pemberitaan tersebut dinyatakan alasan PAN menarik dukungan adalah karena tidak melibatkan koalisi dalam menentukan calon. Menurut Iswan H Cahya, Sekretaris DPW PAN Lampung PAN akan mendukung Arinal dengan syarat mencari mitra koalisi pendukung serta menentukan pendamping dan tim pemenangan dan ketika Arinal tidak bisa memenuhi syarat tersebut maka PAN akhirnya mencabut dukungan" (Fajar, 2017: 17).

Ditariknya dukungan PAN atas Arinal Djunaidi karena suara arus bawah dan sebageian elit PAN di Provinsi Lampung menginginkan agar calon wakil diberikan kepada PAN dan satu suara sudah menguat di internal PAN Lampung yaitu Helmi Hasan adik kandung Zulkifli Hasan dan Zainuddin

Hasan yang saat itu sedang menjabat sebagai Walikota Bengkulu. Dan ketika tidak adanya kepastian dari PAN tentang posisi wakil dan adanya suara-suara di pendukung Demokrat yang tidak menginginkan Helmi Hasan masuk dalam bursa wagub maka dukungan dan rekomendasi itu akhirnya ditarik kembali.

Bagi Partai Demokrat, siapapun wakilnya tidak menjadi persoalan namun ini adalah sebuah kompetisi besar yang memerlukan energi dan jaringan dan tingkat popularitas yang tinggi sedangkan nama Helmi Hasan belum dikenal masyarakat Lampung, tidak cukup hanya dengan mengandalkan ketenaran nama keluarga Hasan, Zulkifli (MPR) dan Zainuddin Hasan (Bupati Lam-Sel). Keinginan kuat PAN untuk memasang adek Zulkifli akhirnya kandas dan rencana koalisi PAN-Demokrat deadlock dan kandas di tengah jalan.

PAN tidak buntu berfikir dan terus berusaha mengambil bagian dalam pilgub Lampung apalagi suaranya di Lampung juga cukup lumayan. Kandas berkoalisi dengan Demokrat membuat PAN melirik kandidat lain yang bisa diajak kompromi guna meraih keuntungan politik terutama keuntungan elektoral menjelang pileg 2019. Golkar menjadi tambatan kedua Partai besutan Zulkifli Hasan untuk memastikan andilnya dalam pilgub saat itu. Koran Tribun Lampung pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 menurunkan berita bahwa PAN kembali dukung Cagub Lampung, kali ini adalah Arinal Nunik. Menurut sumber yang dihimpun oleh Tribun, PAN akhirnya tetap mendukung Arinal-Nunik sebagaimana disampaikan oleh Wahyu Lesmono. Bahkan Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPW PAN Lampung Irfan Nuranda Djakfar menyatakan PAN tidak pernah berkoalisi dengan Partai Demokrat untuk mendukung Ridho (Safruddin, 2018: 12).

Sekilas sikap dan jalan politik yang ditempuh oleh Partai Amanat Nasional (PAN) yang lahir dari rahim bapak reformasi Amien Rais. Tidak ada yang salah dan tercela dalam keputusan dan sikap politik itu dan semuanya absah secara

konstitusional. Namun yang menjadi catatan bagi peneliti disini adalah menuver-manuver politik yang dilakukan oleh elit PAN itu sendiri yang terkadang dinilai oleh masyarakat bahkan oleh internal partai sekalipun agak berlebihan dan kurang pantas secara normatif dan kekeluargaan Amanat Nasional.

Langkah PAN Lampung untuk maju dalam pilgub Lampung tahun 2018 silam memang tidak mulus terutama di internal partai. Berawal dari dilengserkannya Ketua Umum DPW PAN Lampung priode 2015-2018 hasil Muswil PAN Sa'ad Sobari. Pergantian dan penunjukan Ketua DPW PAN yang baru oleh DPP PAN dan diserahkannya tampuk kuasa kepada Bachtiar Basri (Wakil Gubernur) dianggap aneh apalagi masa jabatan Sa'ad belum selesai. Sa'ad Sobari-pun lengser dari Ketua DPW PAN Lampung dan digantikan oleh Bachtiar Basri, sedangkan Sa'ad Sobari didapuk Ketua Harian DPW PAN Lampung. (Isworo, 2017:16)

Dinamika internal DPW PAN Lampung terus bergejolak seiring makin dekatnya tahapan pilgub Lampung tahun 2018 yang lalu. Hukum alampun berlaku buat Bachtiar Basri, jabatan Ketua Umum DPW PAN Lampung diambil alih oleh adek kandung Zulkifli Hasan (Ketum DPP PAN) yaitu Zainuddin Hasan (Mantan Bupati Lam-Sel) melalui Muswillub di Swisss-Belhotel, Bandar Lampung pada bulan September 2017. Ada banyak pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan ini terutama karena Bachtiar sulit dipisahkan dengan Ridha Ficardo sedangkan PAN sudah menjalin koalisi dengan Arinal (Golkar). Masih terbukanya peluang PAN untuk memajukan Helmi Hasan sebagai calon wakil gubernur juga belum tertutup rapat di kubu Golkar sehingga keinginan untuk tampil di panggang koalisi masih ada kemungkinan.

Walhasil, akhirnya PAN menetapkan dukungan resminya kepada Arinal-Nunik bergabung dengan Golkar dan PKB yang sudah membagi jatah komposisi paslon sedangkan PAN dianggap *new comer* dan posisi PAN-pun makin sulit sebab Demokrat sudah menutup pintu, koalisi sudah cukup, sedangkan PDIP

mantab mengusung calon sendiri. Keinginan untuk bisa mengambil bagian utama dari komposisi paslon tidak tercapai dan internal partaipun bergejolak, terutama dua petinggi partai, kedua-duanya mantan ketua umum meradang dan hengkang dari partai sebagai dampak dan resiko yang harus ditanggung oleh PAN Lampung, buntut dari proses pilgub dan resiko dari sebuah keputusan politik yang terkadang mengedapankan nafsu pragmatis dan mengesampingkan norma ideologis dan persudaraan yang romantis. Buruknya lagi bagi PAN Lampung capaian suaranya di pileg 2019 yang lalu menurun drastis termasuk di level nasional berada di bawah PKS dan PKB. Akankah ini menjadi petanda bahwa bang Zulkifli dianggap gagal memimpin partainya? Dan hanya waktu yang bisa menjawab semua itu.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang memiliki basis massa kuat dan jaringan kultural luas memang menjadi target pada kandidat untuk mendekatinya apalagi tipologi partai ini lentur berkomunikasi dengan pihak manapun termasuk dengan kelompok kiri yang dianggap menjaga jarak dengan kaum agamis. Sudah tentu ini menjadi modal tersendiri bagi PKB untuk bisa bergerak di semua lini dan lapisan masyarakat dengan tetap memegang prinsip *wastahiyah*nya dan hal ini yang membuat semua pihak atau bakal calon yang akan maju dalam setiap kontestasi politik di Lampung pasti akan berhitung ulang jika tidak menyertakan PKB sebagai sebuah perahu politik. Disisi lain, lenturnya model pendekatan yang diterapkan dalam konsep rekrutmen politik PKB terkadang sukar untuk dipahami dan diamini oleh anggota karena perubahan yang begitu cepat dan pada saat yang sama kekeh dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Apa yang dialami oleh DPW PKB Lampung pada saat menjelang penjarangan bakal calon kepala daerah pada tahun 2018 lalu menjadi pembuktian dari analisa sederhana diatas. Faktanya, saat itu sempat terjadi kisruh di internal partai bahkan lebih kuat gaungnya daripada apa yang terjadi di Partai Ama-

nat Nasional mengingat kisruh elit di tubuh PKB mencuat ramai di medsos yang sengaja disebar oleh salah satu petinggi PKB Lampung saat itu.

Konflik di tubuh DPW PKB Lampung berawal dari munculnya nama Mustafa (mantan Bupati Lampung Tengah) yang sudah sejak jauh-jauh hari gencar memasang baliho di seantero Lampung dan menyatakan ingin maju dalam bursa pencalonan. Nama Mustafa menguat di internal DPW PKB Lampung karena selain sebagai pejabat daerah, dia juga adalah kader NU dan aktif bergerak di kegiatan keagamaan dengan nuansa kultur Nahdhiyyin.

Khaidir Bujung, Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu DPW PKB Lampung adalah salah satu tokoh elit PKB Lampung yang begitu keras dan ngotot memperjuangkan Mustafa agar bisa maju melalui perahu partainya apalagi survey awal Mustafa cukup baik dan didukung oleh PKS yang memiliki kader militan dan pilih tanding. Menurut Bujung, ditetapkannya dukungan kepada Mustafa karena dia dianggap memiliki kriteria yang dibutuhkan yakni pemimpin yang membawa kemashlahatan buat warga NU dan masyarakat (Redaksi, 2017: 6).

Keingin beberapa elit DPW PKB Lampung untuk mengu-
sung Mustafa-Ahmad-Jajuli akhirnya kandas di tengah jalan. Pasalnya, DPP PKB yang dipimpin langsung oleh Muhaimin Iskandar menyatakan dukungan resmi partainya kepada pasangan Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim (Golkar, PKB dan PAN). Deklarasi dukungan itu dihadiri langsung oleh kedua paslon, dan dalam orasinya Muhaimin menyatakan bahwa ini sudah final (Ihsanuddin, 2017: 16). Tentu keputusan ini membuat beberapa elit yang sudah terlanjur dekat dan menyatakan dukungannya kepada Mustafa meradang dan murka.

Khaidir beberapa kali bicara keras di facebooknya, salah satunya: “Memang seperti itu yang terjadi, DPP hanya melihat PKB Lampung dari Chusnunia Chalim, jadi tidak melihat dari pengurus DPW, struktur partai. Apa yang jadi juklak juknis itu telah dilewati. Saya termasuk orang yang menolak cara seperti

itu. Saya sudah bilang, saya siap dengan segala resikonya. Karena jelas kitabnya tetap aturan, mau partai agama, ini kan organisasi, semua harus dipenuhi. Meskipun nanti jatuhnya kepada beliau tidak masalah, tapi aturannya harus dipenuhi, kalau tidak saya gak akan menerima itu.” Yang disesalkan oleh Bujung adalah karena mekanisme DPW PKB Lampung sudah berjalan sampai pleno di tingkat DPW dan sudah memutuskan satu nama. PKB bukan milik Chusnunia di Lampung, punya pengurus dan kader PKB Lampung tandasnya.

Akibatnya, dua pengurus teras sekaligus Anggota Dewan dari PKB Lampung yang menyatakan sikap berbeda yakni Khaidir Bujung Wakil Ketua DPW PKB Lampung, dan Midi Iswanto anggota Fraksi PKB Lampung yang memilih Mustafa-Ahmad Jajuli dipecat karena dianggap tidak taat dengan keputusan partai. Dan ketika ditanya kepada Khaidir mengenai alasannya kekeh memilih Mustafa, ia menjawab bahwa Mustafa adalah bupati dari NU, ia ikut menolak *full day school*, dan selain DPW PKB Lampung bersama kyai NU sepakat mendukung Mustafa. Sama halnya dengan Midi Iswanto, menurutnya semestinya DPP PKB turun ke lapangan melihat langsung suasana kebatinan pemilih, konstituen, kyai dan kader PKB Lampung.” (L. Hakim, 12) Walau akhirnya kedua tokoh PKB Lampung ini harus menerima akibat dari sikap politiknya yaitu PAW dan melepas jabatan sebagai Anggota Dewan disisa akhir masa jabatan mereka berduknilah resiko dari sebuah sikap politik yang patut untuk diacungkan jempol, dan ketegasan partai yang juga sudah sesuai dengan mekanisme yang ada. Tapi apapun motif dan prosesnya yang jelas bahwa pilgub Lampung tahun 2018 juga memakan dua orang korban di tubuh PKB, Khaidir Bujung dan Midi Iswanto. (Advektorial, 11) Saat ini kedua mantan tokoh PKB tersebut terus bergelut di dunia politik praktis, berganti perahu politik bergabung dengan Partai Demokrat dan mencalonkan diri menjadi anggota dewan kembali.

Agak sedikit berbeda dengan PAN dan PKB Lampung, nampaknya nasib lebih baik dialami internal PPP Lampung. Pasalnya, DPW PPP Lampung walau sempat mengalami kegagalan dalam memutuskan dukungan resminya kepada bakal calon pada pilgub Lampung tahun 2018 silam namun akhirnya partai berlambang Ka'bah ini berhasil melewati ujian dengan baik dan memantapkan dukungan kepada pasangan petahana Muhammad Ridho Ficardo-Bachtiar Basri yang diusung oleh Partai Demokrat dan Gerindra.

Dalam pemberitaan JPNN.Com yang dimuat pada tanggal 12 Oktober 2017 menurunkan judul: "PPP Pertimbangkan Dukungan Arinal di Pilgub Lampung". Menurut Rahman Yacob, Koordinator Wilayah Lampung DPP PPP, masih dua nama kuat yang yaitu Ridho dan Arinal dan tinggal menunggu surat rekomendasi dari Gus Romi (Ketua PPP) kepada siapa dukungan PPP akan diberikan dalam menghadapi Pilgub Lampung tahun 2018 (Dina, 12). Ketidakpastian dukungan DPW PPP Lampung kepada Ridho karena ada isu beliau belum pasti mendapat perahu, sehingga PPP melirik Arinal seperti yang disampaikan oleh Sekretaris DPW PPP Lampung Azazie dan dimuat oleh Koran Lampungpro (Lukman Hakim, 2018: 14). Dukungan resmi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru muncul tertanggal 26 Oktober 2017 dengan Nomor 1472/TG/DPP/X/2017 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP Gus Romi.

Konflik elit PPP di Lampung tidak sebesar yang dirasakan oleh PAN dan PKB karena memang secara capaian politik PKB Lampung lebih rendah dibanding kedua partai diatas sehingga dalam kancah koalisi tidak begitu signifikan, terlihat aman, damai dan nyaris tidak ada konflik. Konflik muncul dari pengurus daerah terutama yang ada di Kota Bandar Lampung mengingat kota ini mengalami kemajuan pesat dibawah komando Herman HN yang juga mencalonkan diri dalam pilgub Lampung. Adalah Albert Alam, Anggota Dewan Kota Bandar Lampung dari Fraksi PPP secara tegas menolak keputusan DPP

yang menunjuk Ridho sebagai calon dan mengesampingkan Herman HN yang dianggapnya berprestasi. Akhirnya DPW PPP Lampung terpaksa memberhentikan Albert Alam karena dinilai telah membelot dari keputusan DPP dengan mendukung Herman HN-Sutono yang diusung oleh PDIP dan kontra koalisi dengan PPP. (Admin, 2018: 21)

Lain cerita PPP lain pula cerita Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung terkait dengan proses pencalonan bakal calon Gubernur Lampung pada tahun 2018 yang lalu. Bagi PKS, sukses pilkada menjadi harga mati demi sukses pileg 2019 mengingat partai ini juga sedang dirundung persoalan internal dan adanya keinginan kuat dari kader agar PKS bisa memecah kebuntuan dalam menembus tembok takdir pilkada Lampung. Bagi PKS, ikut serta dalam pilkada bukan barang baru, bahkan sudah pernah mengajukan calon wakil gubernur Ahamdi Sumaryanto bersama Zulkifli Anwar tahun 2004 dan di beberapa kabupaten kota juga pernah mengajukan calonnya namun kesemuanya tidak ada yang berhasil. Kebuntuan dan takdir pilkada yang belum juga berpihak kepada partai dakwah ini kerap membuat petinggi dan juga kader begitu semangat untuk maju dalam setiap momentum yang ada walau terkadang peluang sangat kecil dan setengah memaksakan diri.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai partai berbasis kader di provinsi Lampung ini termasuk partai yang paling pertama mengusung dan mendeklarasikan dukungannya kepada bakal calon yaitu Mustafa (mantan bupati Lampung Tengah). Disaat partai lain masih sibuk dengan tarik ulur dukungan pilgub Lampung justru PKS sudah mendeklarasikannya melalui Surat Keputusan Rekomendasi Nomor 22/KEP/DPP-PKS/1438 tertanggal 16 Juni 2017. Keputusan PKS mengusung Mustafa tidak berjalan mudah mengingat jauh hari sebelum keputusan ini disampaikan, sesuai dengan mekanisme internal partai, PKS sudah melaksanakan pemilihan raya internal. Dari hasil rekap pemilihan internal itulah muncul tiga nama yaitu Ridho Ficardo, Herman HN dan Mustafa dan setelah melalui

komunikasi politik dan kesepahaman visi dan misi akhirnya PKS memutuskan mendukung Mustafa. Keputusan PKS mendukung Mustafa sempat menjadi sorotan di internal parpol terutama kader-kader militan mengingat Mustafa adalah Ketua Umum DPW Nasdem Lampung, partai yang sangat erat kaitannya dengan pilgub DKI dan isu penistaan agama. Apapun alasannya, menurut Mufti Salim, ini adalah ijtihad politik yang dibarengi dengan niat inginkan perubahan bagi masyarakat Lampung sehingga keputusan DPP tidak perlu didiskusikan terlalu lama dan justru harus segera mengambil langkah untuk kemenangan. (Redaksi, 2017:15)

Sebagai sebuah partai dakwah yang diikat dengan nilai-nilai kejujuran dan kesetiakawanan, PKS mencoba menerapkan prinsip dakwahnya dalam dunia politik yang terkadang dipandang kotor. Silent operation KPK terhadap Mustafa calon yang didukung oleh PKS ternyata tidak menyurutkan langkah partai Islam ini untuk terus bergerak dan memperjuangkan pasangan calon yang sudah mereka sepakati. Bagi PKS ini adalah pembuktian kejujuran dan kesungguhan serta komitmen politik namun di sisi lain ada pihak yang memandang ini bagian dari pragmatisme politik yang agak berlebihan mengingat kekuatan koalisi ada di tangan Mustafa sedangkan PKS dan Hanura dinilai tidak begitu mengakar di masyarakat. (Hindarto,2018: 21)

Tertangkapnya calon Gubernur dari pasangan yang diusung oleh PKS bersama Nasdem dan Hanura sempat memunculkan keraguan di tubuh PKS mengingat isu yang berkembang adalah korupsi dan sosok Mustafa yang dianggap dangat dominan dalam paket pasangan yang diusung. Namun keraguan dan beratnya beban koalisi yang akhirnya harus dipikul sendiri oleh PKS akhirnya terbawa juga berkat ketaatan kader dan jiwa militansi kuat yang bersemayam dalam jiwa setiap kader partai ini. Menjual barang yang sudah cacat walaupun berkualitas tetap berat dan tidak mudah apalagi kandidat lain

juga sangat kuat dan didukung oleh dana operasional yang cukup dan jaringan luas.

Sikap politik yang diambil PKS pada pilgub Lampung tahun 2018 dimana terlibat aktif bahkan paling pertama kali mendeklarasikan calon walaupun dalam perjalanannya terkena silent operation KPK. Teguhnya pendirian PKS untuk terus maju walau calon utamanya tidak ada dinilai masyarakat dan simpatisan sebagai langkah pragmatis dan agak memaksakan diri, menguras energi dan sulit memenangkan pertarungan. Tidak sampai disitu, keinginan untuk memimpin koalisi bersama Nasdem dan Hanura juga tidaklah mulus karena Mustafa dilengserkan dari jabatannya dan para pendukungnya menyebarkan ke calon lain. Walhasil, keputusan penyelenggara pilgub Lampung menetapkan pasangan Arinal-Nunik sebagai pemenang dan akan dilantik pertengahan tahun 2019 ini menggantikan M.Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri untuk periode 2019-2024.

Sebuah Kontemplasi Dari Pilgub Lampung

Kisah pemilihan langsung calon gubernur dan wakil gubernur Lampung yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 Juni 2018 lalu sudahpun usai dan menunggu tanggal pelantikan. Banyak catatan dan harapan serta pelajaran berharga yang bisa dituangkan dalam kajian ini sebagai sebuah kontribusi dari insan akademik atau apapun namanya agar kedepannya kehidupan berdemokrasi bangsa ini terus menemui kedewasaannya. Demokrasi yang bisa melahirkan kesejahteraan dan kedamaian universal bagi anak bangsa walaupun demokrasi itu pada hakikatnya memetakan dan membelah-belah warga dan pendukung dalam menentukan pilihan politik masyarakat. Kendati demikian, jika belajar dari negarane-negara penganut paham demokrasi yang sudah maju akan menemukan bahwa setiap warganegara, aparat hukum bahkan pemimpin negara sekalipun, semuanya tunduk pada aturan yang ada, supremasi hukum, *law enforcement*, tidak terbang

pilih ibarat kata baginda “andaikan Fatimah mencuri niscaya aku potong tangannya.”

Kisruh, konflik, intrik, dinamika politik, gejolak internal, disharmonisasi atau apapun istilahnya memang kerap terjadi di internal partai politik hingga saat ini. Berbagai teori dan gagasan terus dikembangkan oleh para pengamat politik, ilmuwan dan pakar hukum agar persoalan ini bisa direduksi atau dihilangkan. Berbagai macam analisa tajam dan akurat sekelas Lili Romli dari LIPI yang menyatakan bahwa konflik itu hanya karena dua kata “koalisi atau oposisi”, (Romli, 2017: 96) atau Maswadi Rauf yang menyimpulkan konflik terjadi karena perebutan jabatan, berebut kebijakan dan selisih pandangan. Begitu juga teorinya Laurent Bahang, bahwa konflik internal partai politik biasanya karena persoalan ideologi dan organisasi yang bermuara pada modal politik. (Muhammad, 2013: 17) Juga Maulana Yusuf yang menyimpulkan bahwa hiruk pikuk pilkada dari pertama kali diterapkan tahun 2005 hingga saat ini hanya menyuburkan praktek *money politic* dan memupuk akar perpecahan sehingga rawan terjadi konflik sosial. (Yusuf, 2017: 145)

Penutup

Pada dasarnya, setiap proses rekrutmen kandidat bakal calon yang akan diusung oleh sebuah partai politik tidak pernah sepi dari aksi dan reaksi baik dari kandidat maupun dari partai. Reaksi seorang kandidat ketika harapannya tidak dikabulkan oleh elit partai idamannya dan justru menunjuk calon lain dan reaksi elit juga terjadi ketika keinginan elit lokal terhalangi oleh tembok besar pilihan politik elit pusat sehingga kerap memicu kisruh dan pembangkangan dari daerah.

Proses penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur provinsi Lampung tahun 2018 yang lalu juga mengalami cerita duka seperti daerah lainnya. Masalah muncul ketika beberapa partai politik terutama yang berbasis agama dengan spirit perubahan dan sukses pilgub mencoba mengambil peran secara aktif dan dominan, seperti Partai Persatuan Pembangu-

nan (PPP) dengan modal umur dan pengalaman politik, ditambah dengan dukungan kaum santri dari kelompok Nahdhiyin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga memiliki nasab terdekat dengan kaum Nahdhiyyin, figur calon yang *marketable*, Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki basis dukungan dari kalangan Muhammadiyah, popularitas tokoh PAN seperti bang Zulkifli dan keluarganya serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memiliki jaringan kader yang solid, citra politik lebih baik dan lebih bersih.

Setiap pilihan pasti ada resiko begitupun dalam dunia politik sebab hidup adalah pilihan dan perjuangan. Tidak jarang sebuah partai politik harus berhadapan secara hukum dengan kadernya sendiri guna menyelesaikan konflik yang terjadi karena perbedaan pilihan dan kepentingan walaupun hasil akhirnya akan ditentukan oleh sejauhmana internal partai bisa menyelesaikan konflik secara profesional dan proporsional. Sebab jika tidak, apa yang disajikan dalam data kajian ini akan terulang kembali dan terus terjadi sampai kemudian partai terkait menemukan kedewasaannya dalam menyikapi keragaman yang ada atau akan kerdil dan punah oleh sistem dan sikap politisi yang terkadang sulit dibaca.

Daftar Rujukan

- Admin. (2018). DPW PPP Resmi PAW Albert Alam, dalam <https://suluh.co/dpw-ppp-resmi-paw-Albert-Alam>, diakses tanggal 14 Maret 2018.
- Advoktorial. (2019). DPRD Lampung Gelar Paripurna PAW Tiga Anggota Dewan, dalam <http://lampungcentre.com>, diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Aritonang, Dinoroy Margonda. (2016). Coalition Model in Indonesia Presidential System. *Jurnal Mimbar Hukum* 28 (2), 365–78.
- Gunawan, Wawan. (2018). Anomali Kewenangan Dewan Pimpinan PusatP Artai Politik Dalam Sistem Desentralisasi Pemerintahan di Indonesia. *Academia Praja* 1 (1).
- Hakim, Lukman. (2017). DPW PPP Lampung: Kalau Ridho Nggak Apat Perahu, Kami Ke Arinal, dalam <http://lampungpro.com>, Oktober 2017.

- . (2018). Beda Dukungan Di Pilgub Lampung, Kader PKB Tak Takut Sanksi, dalam <https://lampungpro.com>, diakses tanggal 15 Januari, 2018.
- Hakim, Rahmat Nur. (2018). Januari-Juli 2018, 19 Kepala Daerah Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, dalam <http://www.nasional.kompas.com>, diakses tanggal 16 Juni 2018.
- Hawari, Nadirsah. (2019). Tarsyih Kepemimpinan dalam Perspektif Tafsir dan Undang-Undang Pemilu No.7 Tahun 2017. *Jurnal Tapis* 15 (01).
- Hindarto, S Yugo. (2018). PKS Tetap Dukung Tersangka KPK Mustafa Di Pilkada Lampung, dalam <https://www.cnnindonesia.com/pilkada> serentak, diakses tanggal 19 Februari, 2018.
- Imansyah, Teguh. (2012). Regulasi Partai Politik Dalam Mewujudkan Penguatan Peran Dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik, *Jurnal Rechts Vinding, Media Pembinaan Hukum Nasional* 1 (3).
- Isworo, Triyadi. (2017). Bachtar Basri Pimpin DPW PAN Lampung, dalam <http://www.lampost.co/berita> Bachtar Basri Pimpin Dpw Pan Lampung, diakses tanggal 24 Maret 2017.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2009). Intervensi Parpol, Politik Uang dan Korupsi: Tantangan Kebijakan Publik Setelah Pilkada Langsung, UGM: 18.
- Lukmajati, Dendy. (2016). Praktek Politik Uang Dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus Di Kabupaten Blera). *Politika* 7 (1).
- Mahadi, Helmi. (2011). Pragmatisme Politik: Studi Kasus Rekrutmen Politik PDI-P Pada Pilkada Kabupaten Sleman. *Jurnal Studi Pemerintahan* 2 (1).
- Muhammad, Djibril. (2013). Konflik Internal Parpol Bersumber Dari Ideologi Dan Organisasi, dalam <https://republika.co.id>, diakses tanggal 15 Februari 2013.
- Noor, Firman. (2018). Pilkada, Peran Partai Politik, Dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng Dan Jatim (2017-2018). *Jurnal Penelitian Politik* 15 (2): 179–96.
- Ihsanuddin. (2017). PKB Dukung Arinal Chusnunia Di Pilgub Lampung, dalam <https://nasional.kompas.com>, diakses tanggal 15 Desember 2017.
- Redaksi. (2017). PKS Lampung Umumkan Dukung Mustafa Maju Pilgub 2018, dalam <http://www.pks.co.id/content/pks-Lampung>, diakses tanggal 25 Juli 2017.
- Redaksi, Tim. (2017). DPW PKB Lampung Dukung Mustafa Sebagai Cabug Lampung, dalam <https://www.lampung.co>, diakses tanggal 22 Oktober 2017.

- Romli, Lili. (2017). Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi. *Jurnal Politica* 8 (2): 97–118.
- Rumesten RS, Iza. (2014). Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung. *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2).
- Safruddin. (2018). Alasan Kembali Dukong Cagub Lampung Arinal-Nunik, dalam [http//www. lampung. tribunnews.com/2018](http://www.lampung.tribunnews.com/2018), diakses tanggal 10 Januari 2018.
- Sumatera, Fajar. (2017). Pilgub Lampung 2018, PAN Tarik Dukungan Untuk Arinal, dalam [http//www. kumparan. com](http://www.kumparan.com), diakses tanggal 27 Desember 2017.
- W, Dina. (2017). PPP Pertimbangkan Dukong Arinal Di Pilgub Lampung, dalam [http//www.pilkada.jppn.com](http://www.pilkada.jppn.com), diakses tanggal 21 Oktober 2017.
- Yusuf, Maulana. (2017). Etika Islam Dalam Ranah Politik: Respons Dan Tinjauan Kritis Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Provinsi Jambi Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Langsung (2005-2015). *Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*.41 (1).
- Zulfikar, Muhammad. (2017). Mendagri: Sejak 2004 Sebanyak 392 Kepala Daerah Tersangkut Persoalan Hukum, dalam [http//www. tribunnews. com. nasional](http://www.tribunnews.com.nasional), diakses tanggal 17 Maret 2017.